



PEMKOT PERKUAT ANALIS JABATAN Penerapan Lelang Jabatan Masih Panjang

YOGYA (KR) - Rencana untuk menerapkan sistem lelang jabatan di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Meski demikian, Pemkot Yogyakarta mulai memperkuat petugas analis jabatan agar mampu bertugas lebih optimal.

Penguatan tersebut diwujudkan dalam Workshop Analisa Jabatan yang melibatkan petugas analis jabatan, Selasa (28/7). Seluruh analis jabatan mulai dari tingkat kelurahan hingga tiap satuan kerja perangkat daerah turut dilibatkan.

"Lelang jabatan masih panjang, tergantung kebijakan kepala daerah. Tapi muaranya tetap membutuhkan tim analis jabatan sehingga mereka kami *refresh* ulang ketugasannya," papar Kabag Organisasi Setda Kota Yogyakarta, Kris Sarjono Sutejo di sela

workshop.

Salah satu tahapan untuk menerapkan sistem lelang jabatan ialah membentuk *assessment centre*. Lembaga tersebut yang akan dijadikan sebagai bank data pegawai dan bertugas melakukan proses analisis jabatan, beban kerja serta kapasitas pegawai menurut jenjang kepangkatan.

Sedangkan perhitungan beban kerja, kebutuhan pegawai serta spesifikasi pegawai yang dibutuhkan, seluruhnya merupakan ketugasan tim analis jabatan. Lelang jabatan, imbuh Kris Sarjono, merupakan mekanisme untuk mengisi jabatan tertentu. Meski merupakan amanat undang-undang, namun belum banyak daerah yang sudah menerapkan sistem tersebut. "Di tingkat DIY baru Kulonprogo yang sudah mengawali," katanya.

Hingga saat ini, pengisi-

an jabatan di lingkungan Pemkot Yogyakarta masih menerapkan sistem konvensional. Yakni melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang berisi berbagai instansi teknis seperti Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat serta Bagian Organisasi.

Terkait dengan hasil analisis jabatan, total kebutuhan pegawai ideal di lingkungan Pemkot Yogyakarta ialah sekitar 12 ribu orang. Namun saat ini baru terpenuhi 8 ribu orang dan masih ada kekurangan 4 ribu orang. Keterpenuhan pegawai di tiap instansi rata-rata baru 60 persen. "Yang paling kurang itu tenaga administrasi. Kalau guru maupun tenaga medis sebenarnya sudah seimbang. Tapi tiap tahun tim analis jabatan selalu menghitung kebutuhannya," jelas Kris Sarjono. **(Dhi)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005